

**STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
(SUATU KAJIAN PENERAPAN ANALISIS SWOT)**

**GERI PRATAMA  
&  
TUTI KHAIRANI**

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax  
(0761) 63277  
Jalan Karya No 89 Pekanbaru. geri\_pratama25@yahoo.com Telp: (081266634552)

This study will analyze how the strategy of Regional Income Office Pekanbaru city in the management of advertisement tax. Acquisition revenue (PAD) from advertisement tax in pekanbaru sector is potentially quite high, because there is little individual or business entity that uses advertising as a tool to promote their business. Also in the collection of advertisement tax should not be difficult, since the object and the number of its points are clear. Achievement should gain local revenue (PAD) of the sector can be met, so that by optimizing the collection of advertisement tax is expected to increase local revenue (PAD).

Regional Income Office strategies in the management of advertisement tax in the city of Pekanbaru to be very important in providing an understanding and sense of community to the intent and purpose to be conveyed can be well received by the public. The factors that can be made strategy success indicators in regional income Office in the management of advertisement tax in the city of Pekanbaru form of strength (Strength), weakness (Weakness), opportunities (Opportunity) and threat (Threat).

Strategies that have been implemented by the revenue department in the management area of the city Pekanbaru billboard tax has been running well in carrying out its function as the agency making payments and income taxes and levies. Look at the foundation of law and a strong commitment to perform from all ranks to increase tax revenues Pekanbaru city billboards, but there are some indicators that still have not been able to run well. Indicator of the weaknesses and threats in the form of the limited number of employees and also the lack of operational infrastructure and buildings and inadequate equipment and owned by the local revenue department Pekanbaru city. Community participation are not abiding tax is also one of the problems preventing the reception and management of advertisement tax in Pekanbaru city.

Keyword : Regional Income Office Pekanbaru City, Advertisement Tax, Strategy, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats.

Seperti ditegaskan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa posisi keuangan sangat penting sebab pemerintah daerah tidak dapat terlaksana dengan efektif dan efisien bila tidak didukung sumber keuangan yang memadai.

Agar pelaksanaan otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab dapat berjalan dengan baik, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus terealisasi. Hal yang terpenting adalah pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat terutama dalam hal mencari dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah terutama peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk membiayai seluruh kepentingan umum salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran aktif dari warga atau masyarakat untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai bahan hukum publik. (Surantono, 1997:57).

Pajak daerah terdiri dari dua jenis yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak daerah Tingkat I terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak daerah kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penggalian dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak daerah yang lain dapat dipungut asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut : bersifat sebagai pajak bukan retribusi, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, potensinya memadai, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Pekanbaru maka visi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak lepas dari visi Kota Pekanbaru seperti yang dirumuskan pada Renstra Pemerintah Kota Pekanbaru yakni "Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan takwa". Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatarbelakangi oleh kondisi riil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan

kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat maka dirumuskanlah visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam rencana strategi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ini. Adapun visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah "Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan".

Adapun misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pemungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Menerapkan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah.
4. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
5. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jika dilihat dari berbagai jenis pajak, maka pajak reklame merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diandalkan sebagai anggaran untuk melaksanakan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah berupa pajak reklame yang merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang mempunyai nilai penerimaan yang dapat diandalkan dari jenis pendapatan yang ada di kota Pekanbaru.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengelolaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan dari pajak reklame.

### **Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu, khususnya dibidang strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai informasi bagi pemerintah kota Pekanbaru, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam membuat kebijaksanaan yang lebih baik dalam pengelolaan pajak reklame guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Sebagai bahan informasi bagi wajib pajak khususnya wajib pajak reklame dalam memahami mekanisme pemungutan pajak reklame serta sebagai bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama pada masa akan datang.

## **METODE**

Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif yang menjelaskan tentang strategi pengelolaan pajak, khususnya pajak reklame. Untuk mengetahui strategi pengelolaan pajak reklame di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan/ditabulasi, diklasifikasikan serta dianalisa menurut jenis dan sifatnya kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Strategi Pengelolaan Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Strategi merupakan sebuah proses yang meliputi, alat untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi pada hakikatnya perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Strategi menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat agar maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi agar strategi bisa berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang bisa dijadikan indikator dalam keberhasilan strategi menurut Fred R. David berupa kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*).

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melihat kontribusi dan potensi dari pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah perlu dilakukannya kajian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam penelitian.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi dinas pendapatan daerah dalam pengelolaan pajak reklame di kota Pekanbaru, penulis akan menguraikan dan menjelaskan hal-hal tersebut yang didukung oleh data - data dan informasi yang berhasil diperoleh dari fenomena dilapangan dengan melakukan wawancara, observasi yang akan dipadankan teknik triangulasi yaitu membandingkan data hasil penglihatan dan data hasil wawancara

dengan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini serta membandingkan wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

Dilihat dari indikator SWOT berupa kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*). Strategi pengelolaan pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memang telah dijalankan dengan baik, namun demikian ada beberapa strategi yang belum bisa berjalan semestinya.

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan pajak reklame kota Pekanbaru berupa, adanya kekuatan hukum yang mengikat, komitmen dari pegawai yang tinggi, adanya infrastruktur teknologi informasi yang terbaru, adanya standar operasional prosedur yang baku serta intensif pajak bagi para aparaturnya bisa menjadi kekuatan dalam strategi pengelolaan pajak reklame.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang terjadi dalam strategi pengelolaan pajak reklame di kota Pekanbaru disebabkan berbagai kekurangan yang dimiliki oleh dinas pendapatan daerah itu sendiri. Masih kurang kemampuan teknis pegawai dan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame di kota Pekanbaru.

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang-peluang yang ada pada pengelolaan pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah kota Pekanbaru dari sektor pajak dan retribusi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dan adanya potensi yang belum digali serta dukungan dari para stakeholder diharapkan mampu menunjang strategi pengelolaan pajak reklame kota Pekanbaru.

4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman yang sangat dirasakan dalam strategi pengelolaan pajak reklame di kota Pekanbaru berupa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membayar pajak reklame, penerapan undang-undang yang saling tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat lambatnya alokasi dana pembangunan bagi daerah.

## **B. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan dari pajak reklame**

1. Internal

- a) Faktor penghambat pelaksanaan strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan dari pajak reklame dari internal dinas pendapatan daerah berupa masih kurangnya sumber daya

manusia yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknis perpajakan terutama sekali pajak reklame.

- b) Faktor lainnya berupa masih kurangnya infrastruktur yang tersedia baik itu berupa infrastruktur gedung, peralatan kantor, maupun mobil operasional.

## 2. Eksternal

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan maupun membayar pajak reklame.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum strategi yang telah dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan pajak reklame telah berjalan dengan baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai instansi yang melakukan pungutan dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun ada beberapa indikator yang masih belum bisa berjalan dengan baik. Indikator mengenai kelemahan dan ancaman berupa masih terbatasnya jumlah pegawai dan juga kurangnya infrastruktur operasional maupun bangunan gedung dan peralatan serta yang belum memadai yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Peran serta masyarakat dalam taat pajak juga menjadi salah satu masalah yang menghambat penerimaan dan pengelolaan pajak reklame di kota Pekanbaru.

Faktor penghambat pelaksanaan strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan dari pajak reklame, berupa faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berupa masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknis perpajakan terutama sekali pajak reklame dan juga masih kurangnya infrastruktur yang tersedia baik itu berupa infrastruktur gedung, peralatan kantor, maupun mobil operasional. Sedangkan dari faktor eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan maupun membayar pajak reklame.

## **SARAN**

Adapun saran peneliti agar strategi yang direncanakan dapat berjalan dengan baik perlu penambahan petugas atau tenaga pengawas dan juga infrastruktur untuk melakukan peninjauan di lapangan, serta perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kewajiban dalam penyelenggaraan reklame serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak dengan baik. Juga harus diperhatikan dengan perlu meningkatkan strategi dalam pengawasan secara rutin terhadap reklame yang tidak memiliki izin ataupun sudah habis masa pajaknya. Selain itu masyarakat sebagai wajib pajak yang baik, sudah seharusnya

wajib pajak reklame bertanggung jawab untuk membayar pajak atas setiap penyelenggaraan reklame yang dilakukannya serta melakukan penyelenggaraan reklame yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

David, Fred R., terjemahan Pauly Sulistio dan Harryadin Mahardika, *Strategic Management*, 2006, Edisi Kesepuluh, Salemba Empat, Jakarta.

Kaho, J. Riwu, 1997, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi, Jakarta.

Moleong, Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rangkuti, Freddy, 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Surantono, Bambang, 1997, *Pengetahuan Praktis Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.

## **Undang-Undang**

Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2006 Tentang *Pajak Reklame*.